

VIRUS COVID-19, TATANAN KEPENDUDUKAN, DAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

Dwi Utari Tamanbali
Fakultas Ekonomi,
Universitas Ottow Geissler Jayapura, Indonesia
dwiutari.tamanbali@gmail.com

Abstrak

Penyebaran virus Corona (COVID-19) sangat cepat. Kewaspadaan pada wabah yang semula hanya mendatangkan dampak berupa krisis di bidang kesehatan, kini bergeser menjadi multikrisis. Seluruh sektor pembangunan ikut merasakan dampaknya, salah satunya Bonus Demografi. Saat ini Indonesia sedang menuju masa Bonus Demografi dimana diprediksi bahwa antara tahun 2030 - 2040 jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif. Situasi ini tentunya akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Namun merebaknya COVID-19 telah memporak-porandakan tatanan kependudukan di Indonesia. Usia produktif tersebut sedang berhadapan dengan ancaman virus corona. Pandemi tersebut menyebabkan penderitaan masyarakat karena hilangnya penghasilan, meningkatnya kemiskinan, berkurangnya asupan gizi dan berkurangnya akses terhadap kesehatan. Jika pandemik terus berlangsung maka sebagian penduduk yang akan mengalami usia produktif di masa mendatang akan tergerus karena dampak COVID 19. Hal ini sangat dikhawatirkan karena peluang perekonomian negara akan maju apabila generasi penerus mampu memiliki daya saing tinggi pada masa bonus demografi.

Kata kunci: COVID-19, kependudukan, bonus demografi

Abstract

The spread of Coronavirus (COVID-19) is very fast. Vigilance in the outbreak that originally only brought the impact of the crisis in the field of health, has now shifted to multi-crisis. The entire development sector also felt the impact, one of which was the Demographic Bonus. Currently Indonesia is heading towards the Demographic Bonus period where it is predicted that between 2030 - 2040 the number of productive age population is greater than the unproductive age. This situation will certainly benefit economic growth. However, the outbreak of COVID-19 has ravaged the population order in Indonesia. The productive age is dealing with the threat of coronavirus. The pandemic caused people's suffering due to loss of income, increased poverty, reduced nutrient intake and reduced access to health. If the pandemic continues then some of the population who will experience productive age in the future will be affected by the impact of COVID 19. This is very worrying because the economic opportunities of the country will be developed if the next generation is able to have high competitiveness at the time of demographic bonuses.

Keywords: COVID-19, population, demographic bonus

Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Secara umum, faktor-faktor seperti sumber daya alam, material, dan finansial tidak akan memberikan manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, dan tingkat kesejahteraan hidup. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa prioritas pembangunan nasional di Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab, SDM merupakan kunci masa depan Indonesia. Tujuannya menghasilkan manusia yang unggul dan maju. Oleh karena itu, jika ingin SDM pada peringkat bagus maka pembangunan pengetahuan dan ketrampilan, kesejahteraan dan kesehatan harus mendapatkan perhatian berimbang dalam pembangunan.

Penyebaran virus COVID-19 sangat cepat. Upaya pencegahan penularan COVID-19 menyebabkan diterapkannya kebijakan pembatasan fisik dan sosial. Pemerintah melarang kegiatan-kegiatan tertentu yang mendorong terjadinya kerumunan masa. Akibatnya, kantor, perusahaan dan pusat pelayanan masyarakat harus menyesuaikan cara kerja dan jam kerja mereka. Ada yang mengurangi jam kerja, ada yang mengubah jam kerja, bahkan ada yang memutuskan menutup sementara kegiatannya. Perjalanan juga harus dikurangi baik untuk berbelanja, berwisata, dinas, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Kewaspadaan pada wabah yang semula hanya mendatangkan dampak berupa krisis di bidang kesehatan, kini bergeser menjadi multikrisis. Upaya menekan penyebaran virus ini berdampak pada semua aspek pada sektor pembangunan ekonomi dan memiliki efek dramatis pada kesejahteraan banyak keluarga dan masyarakat. Turunnya penghasilan menyebabkan turunnya permintaan konsumen. Turunnya permintaan berakibat pada menurunnya produksi. Menurunnya produksi berdampak pada menurunnya pendapatan pelaku usaha sementara karyawan perusahaan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebaliknya turunnya produksi mengakibatkan naiknya harga bagi konsumen. Permasalahan ekonomi tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan pendidikan dan kesehatan yang menyertainya.

Saat ini Indonesia sedang menuju masa Bonus Demografi dimana diprediksi bahwa antara tahun 2030 - 2040 jumlah penduduk usia produktif, usia 15-64 tahun, lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif yaitu usia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun. Diperkirakan bahwa pada rentang waktu sepuluh tahun tersebut, angkatan kerja Indonesia mencapai 67% sedangkan rasio ketergantungan turun hingga titik 47%. Situasi ini tentunya akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Namun merebaknya COVID-19 telah memporak-porandakan tatanan kependudukan di Indonesia. Usia produktif tersebut sedang berhadapan dengan ancaman virus corona. Pemasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana dampak COVID-19 terhadap tatanan kependudukan di Indonesia? Bagaimana pengaruhnya terhadap bonus demografi?

COVID-19 dan Tatanan Kependudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan wabah virus corona berpotensi menyebabkan Indonesia kesulitan mencapai target pembangunan 2020 - 2024. Pandemi telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sebesar 0.3 persenⁱ. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, terjadi kenaikan jumlah pengangguran antara 2,9 juta sampai dengan 5,2 juta orang dan sebanyak 1.1 juta sampai dengan 3,78 juta orang berpotensi menjadi miskinⁱⁱ. Hal ini terjadi seiring upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Pembatasan fisik dan sosial, misalnya, mengharuskan masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah. Pemerintah melarang kegiatan-kegiatan yang mendorong berkumpulnya banyak orang sehingga kantor dan dunia usaha harus menyesuaikan jam kerja. Dengan tutupnya usaha atau berkurangnya jam kerja, rumah tangga terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kurangnya pendapatan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kepada VOA, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi pandemic COVID-19 berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan sebesar 3,2 hingga 1,2 persenⁱⁱⁱ. Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan sektor industri harus mengurangi produksinya. Penurunan kapasitas produksi tentunya berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sektor kesehatan, pandemi menyebabkan gangguan dalam layanan kesehatan. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap penanganan pasien yang terdampak virus corona (COVID-19) sehingga layanan kesehatan untuk penyakit lain harus disesuaikan. Dalam penyesuaian tersebut, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menghindari membawa anak-anak ke rumah sakit atau layanan kesehatan lain kecuali gawat darurat^{iv} seperti sesak napas, kejang, hilang kesadaran, demam tinggi, diare terus menerus, pendarahan, keracunan, atau kecelakaan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 telah mengganggu stabilitas layanan program imunisasi^v. Walaupun anak-anak memiliki resiko lebih rendah tertular COVID-19, keterlambatan imunisasi akan menyebabkan anak-anak beresiko tinggi tertular penyakit lain yang dapat dicegah dengan vaksin. WHO menambahkan bahwa sekitar 13 juta orang di dunia telah terkena dampak karena keterlambatan imunisasi rutin. Imunisasi tersebut diantaranya untuk mencegah penyakit polio, campak, kolera, demam kuning dan meningitis^{vi}. Pembangunan SDM dari perspektif kesehatan meletakkan dasar pada indikator kelangsungan hidup di bawah 5 tahun, stunting, dan tingkat kelangsungan hidup dewasa yang terkait dengan kesakitan dan kematian dini karena penyakit. Turunnya derajat kesehatan karena gangguan terhadap layanan kesehatan menyebabkan berkurangnya kualitas sumber daya manusia. Kesehatan merupakan potensi dasar dari setiap individu yang sangat diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas karena ada keterkaitan antara status kesehatan dan produktivitas ekonomi.

Ketahanan pangan menjadi sangat penting pada situasi bencana termasuk pada masa bencana wabah penyakit pandemi COVID-19. Konsep ketahanan pangan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Nurhemi dan Soekro, 2014)^{vii}. Berdasarkan pengertian dalam undang-undang tersebut, ketahanan pangan keluarga menyangkut tiga aspek penting yaitu ketersediaan jumlah, keamanan terhadap akses, dan konsumsi pangan. Aspek ketersediaan jumlah bergantung pada sumber daya alam, fisik dan manusia. Aspek keamanan terhadap akses pangan hanya tersedia apabila keluarga memiliki penghasilan yang cukup. Sementara, aspek konsumsi pangan merupakan aspek yang menentukan bagi keluarga dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyatakan bahwa akan ada ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19^{viii}. Ditengah wabah COVID 19 ketersediaan pangan terkendala karena pembatasan transportasi. CSIS (2020)^{ix} melaporkan bahwa 80 persen konsumen perkotaan di negara berkembang mengandalkan sumber pangan dari tempat lain. Pembatasan transportasi menyebabkan terbatasnya pilihan yang ada. Sementara, akses terhadap pangan menurun sebagai akibat berkurangnya atau hilangnya pendapatan karena kebijakan bekerja di rumah dan PHK. Menurunnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan memunculkan kekhawatiran lanjutan yaitu memburuknya status gizi masyarakat. Menurut dr. Kirana Pritasari MQIH, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, pemenuhan gizi anak diperlukan untuk menjaga imunitas agar anak terhindar dari infeksi virus COVID 19 dan penyakit infeksi lainnya yang dapat menyebabkan kematian seperti diare dan infeksi saluran pernafasan^x. Makanan bergizi lengkap adalah salah satu aspek kesehatan yang menentukan kualitas sumber daya manusia.

Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona melalui kebijakan membatasi interaksi sosial dengan orang lain dan mengurangi kegiatan di luar rumah berdampak pula pada sektor pendidikan. Kebijakan di rumah saja mengharuskan dunia pendidikan meniadakan atau mengurangi kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka dan menggantikannya dengan metode pembelajaran jarak jauh. Metode tersebut menyebabkan siswa kehilangan kesempatan untuk belajar dan pengembangan potensi mereka. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan UNICEF^{xi} mengatakan bahwa penutupan sekolah berdampak pada kesulitan anak dalam menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tingkatan kelas yang diharapkan. Hal ini terjadi karena pembelajaran daring dilakukan dengan durasi yang lebih pendek sehingga waktu belajar berkurang dan materi pembelajaran dipadatkan. Selain itu, peralihan metode pembelajaran memberikan banyak tantangan bagi berbagai pihak. Pembelajaran jarak jauh menimbulkan kesulitan bagi guru, siswa, dan orang tua karena tidak semua memiliki fasilitas teknologi, akses terhadap jaringan, dan internet. Kesulitan belajar juga timbul karena mereka tidak terbiasa menggunakan metode daring. Lebih lanjut, penutupan sekolah berdampak terhadap hilangnya akses ke program gizi berbasis sekolah yang mendorong bertambahnya jumlah anak yang kurang gizi. Selain itu, penutupan sekolah yang berkepanjangan dapat meningkatkan jumlah anak putus sekolah. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan setelah sekolah dibuka kembali karena tekanan ekonomi. Putus sekolah serta kurangnya pengetahuan menurunkan kualitas sumber daya manusia bagi negara yang bersangkutan. Dimasa yang akan datang, anak-anak tersebut kesulitan untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi baik bagi mereka maupun keluarga mereka.

Virus COVID-19 juga berimbas pada masalah kependudukan. Berdasarkan riset Badan PBB untuk Dana Kependudukan (UNFPA), bila gangguan layanan kesehatan dan pembatasan fisik dan sosial terus terjadi akibat COVID-19, sebanyak 47 juta perempuan di seluruh dunia diprediksi tak bisa mengakses alat kontrasepsi modern secara rutin. Konsekuensinya akan muncul 7 juta kehamilan tak diharapkan (KTD)^{xii}. Di Indonesia, merebaknya wabah COVID 19 mempengaruhi pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kepala BKKBN mengatakan bahwa pandemik menyebabkan pasangan usia subur (PUS) tidak bisa mengakses layanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan karena kebijakan bekerja dari rumah atau memilih menunda mengakses layanan KB karena adanya kekhawatiran tertular COVID-19^{xiii}. Selama masa pandemic telah terjadi penurunan rata-rata penggunaan alat kontrasepsi sebesar 40% pada bulan Maret 2020 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2020^{xiv}. Pakar Migrasi dan Kependudukan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi mengungkapkan, menurunnya angka partisipasi program KB selama masa pandemi covid-19 akan meningkatkan angka kehamilan tidak diharapkan. Hal ini berpengaruh buruk pada capaian bonus demografi^{xv} karena peningkatan kualitas

SDM juga menekankan pada peningkatan kesehatan reproduksi dan KB. KTD bisa menimbulkan berbagai permasalahan seperti stunting, angka kematian ibu dan bayi serta permasalahan lainnya di masa yang akan datang sehingga mengganggu kualitas SDM penduduk Indonesia untuk memetik Bonus Demografi tersebut.

Dampak COVID-19 terhadap Bonus Demografi

Bonus Demografi adalah situasi dimana jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) akan lebih mendominasi dibandingkan mereka yang belum berusia produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Kementerian PPN (Bappenas) menyatakan bahwa Indonesia diproyeksi akan menyongsong bonus demografi pada 2030-2040^{xvi}. Diperkirakan pada periode tersebut penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 67 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Untuk memetik Bonus Demografi harus memenuhi syarat kuantitas dan syarat kualitas. Dari segi kuantitas, tidak perlu dikhawatirkan karena selama masa pandemi diproyeksikan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk akibat peningkatan kehamilan yang tidak diharapkan.

Yang perlu dikhawatirkan adalah segi kualitas SDM. Setelah sekitar dua belas bulan masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID 19, virus ini bukan hanya mengganggu kesehatan namun juga memberikan pengaruh besar pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sisi kesehatan, gangguan terhadap layanan kesehatan berakibat pada kondisi kesehatan masyarakat yang memburuk secara jangka panjang. Jadwal imunisasi yang terganggu dapat mengancam terjangkitnya penyakit yang sudah ada vaksinya seperti polio, campak, dan kolera. Bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dan ibu hamil terancam tertular penyakit non-corona virus. Sementara dari segi ekonomi, fenomena PHK yang terjadi mengancam nasib perekonomian masyarakat Indonesia saat ini dan masa depan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi memiliki dampak pada rendahnya daya beli dan menurunnya kemampuan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan pokok yang bergizi. Kurang gizi kronis yang berlangsung lama akan menyebabkan anak mengalami gangguan kesehatan sepanjang hidupnya dan kurang produktif sehingga menjadi beban bagi keluarga. Kesulitan ekonomi dan kehamilan tidak diharapkan dapat meningkatkan resiko kurang gizi pada ibu hamil dan janin. Hilangnya pendapatan juga menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses pendidikan. Kalau dari sisi kesehatan dan gizi tidak terpenuhi dan akses pendidikan juga tidak terjangkau maka peluang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing akan semakin rendah. Situasi ini sudah tentu akan menghambat Indonesia kepada pencapaian bonus demografi.

Apa yang harus dilakukan?

Dalam situasi ini, Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat untuk memastikan bonus demografi tetap dapat tercapai. Pemerintah harus memusatkan perhatian pada beberapa hal. Pertama, penanganan masalah kesehatan dan masalah kemanusiaan. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 pelayanan kesehatan secara tatap muka dibatasi, sehingga pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah juga perlu mengaktifkan layanan hotline. Kedua, ajak masyarakat untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh dengan olah raga teratur di rumah. Olah raga baik tidak hanya untuk kesehatan fisik namun juga untuk menjaga kesehatan mental. Ketiga, pemerintah harus melindungi ekonomi keluarga agar dapat bertahan dalam situasi sulit dengan memastikan ketersediaan pangan di rumah. Sektor rumah tangga sedang mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena hilangnya pendapatan. Daya beli mereka menurun. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan berkebun sayur-mayur di rumah. Mereka yang memiliki halaman terbatas bisa diajarkan cara berkebun dalam pot, berkebun gantung, berkebun vertikal, atau berkebun hidroponik. Sementara bagi mereka yang memiliki lahan kosong dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam pangan. Bila hasil kebunnya melebihi kebutuhan konsumsi rumah tangga, pemerintah menyerap hasil-hasil tersebut sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga. Keempat, pengetahuan keluarga terhadap pemilihan bahan makanan bergizi dengan harga yang terjangkau juga harus menjadi perhatian. Keluarga perlu diberikan pemahaman tentang memilih dan memilah makanan bergizi sesuai kemampuan untuk memastikan terpenuhinya asupan gizi keluarga. Kelima, pemerintah juga harus memberikan stimulus seperti menyediakan pasar. Kebijakan pemerintah membagikan beras kepada masyarakat diharapkan dapat mendukung usaha petani di Indonesia dengan tidak menggunakan beras impor. Pemerintah sebaiknya menggunakan beras lokal yang dihasilkan oleh petani Indonesia. Keenam, dengan banyaknya tantangan penerapan pembelajaran jarak jauh, pemerintah harus mendorong guru agar lebih kreatif dalam menyesuaikan pembelajaran selama masa pandemi sehingga semua anak baik yang memiliki akses terhadap teknologi maupun yang tidak, tetap dapat belajar dengan baik dari rumah. Bimbingan rutin kepada orang tua juga wajib diberikan agar mereka mampu menjadi guru bagi anak-anaknya di

rumah. Ketujuh, untuk mengurangi KTD pemerintah harus terus berupaya memastikan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama masa bencana COVID-19 dengan mengoptimalkan penerangan KB tentang pentingnya mengatur perencanaan kehamilan ke masyarakat melalui media masa dan media sosial. Semakin banyak bayi yang lahir sehat berarti semakin banyak generasi muda yang siap mengikuti pembelajaran di sekolah dengan kapasitas pengetahuan yang maksimal sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas, produktif, dan tetap sehat sepanjang hidup. Dengan cara ini Indonesia dapat menikmati bonus demografi.

Penutup

Merebaknya pandemi COVID-19 menjadi potensi penghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM. Indonesia menghadapi permasalahan tidak hanya disektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi dan sosial. Menurunnya tingkat kesehatan, hilangnya pendapatan, meningkatnya kemiskinan, dan terganggunya pendidikan menjadi ancaman bagi generasi yang akan datang. Pemerintah diharapkan mampu merespon situasi ini dengan tepat agar bonus demokrasi dapat dinikmati.

Daftar Pustaka

i Katadata. Bappenas: Virus Corona Pangkas Potensi Pertumbuhan ekonomi RI 0.3%. 24 Februari 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/02/24/bappenas-virus-corona-pangkas-potensi-pertumbuhan-ekonomi-ri-03>. Diakses pada 17 November 2020

ii Okezone. Angka Pengangguran dan Kemiskinan RI meningkat Imbas COVID-19, berikut faktanya. 19 April 2020. <https://economy.okezone.com/read/2020/04/17/320/2200550/angka-pengangguran-dan-kemiskinan-ri-meningkat-imb-19-berikut-faktanya>. Diakses pada 17 November 2020

iii VOA Indonesia. Menkeu: Dampak COVID-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 bisa Minus 0.4 persen. 2 April 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>. Diakses pada 24 November 2020

iv Kompas.com. Pandemi COVID-19: Ahli Ingatkan Tunda Bawa Anak ke Rumah Sakit, Kecuali Gejala Darurat Berikut... 5 Mei 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/05/133000723/pandemi-covid-19--ahli-ingatkan-tunda-bawa-anak-ke-rumah-sakit-kecuali>. Diakses pada 29 November 2020

v Internasional. WHO: Pandemi corona masih jauh dari selesai dan ganggu layanan kesehatan lain. 28 April 2020. <https://internasional.kontan.co.id/news/who-pandemi-corona-masih-jauh-dari->

[selesai-dan-ganggu-layanan-kesehatan-lain](#). Diakses pada 27 November 2020

vi VOI. WHO Soroti COVID-19 Ganggu Program Imunisasi anak di Dunia. 28 April 2020. <https://voi.id/artikel/baca/5282/who-soroti-covid-19-ganggu-program-imunisasi-anak-di-dunia>. Diakses pada 27 November 2020

vii Nurhemi, Shinta R.I dan Soekro, Guruh Suryani R. 2014. Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan. Working Paper. Bank Indonesia WP/4/2014

viii Antaranews. Presiden Jokowi Soroti Ancaman Krisis Pangan dan Ketahanan energi. 30 April 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1453455/presiden-jokowi-soroti-ancaman-krisis-pangan-dan-ketahanan-energi>. Diakses pada 25 November 2020

ix Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Covid-19 Threatens Global Food Security: What Should the United States Do?. 22 April 2020. <https://www.csis.org/analysis/covid-19-threatens-global-food-security-what-should-united-states-do>. Diakses pada 25 November 2020

x Republika. Ahli: Jangan Abaikan Gizi Anak Selama Pandemi Covid 19. 24 April 2020. <https://republika.co.id/berita/q9958j349/ahli-jangan-abaikan-gizi-anak-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada 17 November 2020

^{xi} Kompas.com. Perhatikan, 3 Dampak pandemic Covid-19 terhadap Anak. 12 Mei 2020.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2020/05/12/085714720/perhatikan-3-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-anak?page=all>. Diakses pada 25 November 2020

^{xii} Media Indonesia. UNFPA: Pandemi Virus Korona Tingkatkan Kekerasan Gender. 1 Mei 2020.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/309340-unfpa-pandemi-virus-korona-tingkatkan-kekerasan-gender>. Diakses pada 27 November 2020

^{xiii} BKKBN. Cara BKKBN Cegah Kehamilan Tidak Diinginkan di Tengah Pandemi COVID-19 dan Cegah ODHA tertular COVID-19. 21 April 2020.

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/cara-bkkbn-cegah-kehamilan-tidak-diinginkan-di-tengah-pandemi-covid-19-dan-cegah-odha-tertular-covid-19>. Diakses pada 27 November 2020

^{xiv} Media Indonesia. Pandemi COVID-19 Bisa Picu Baby Boom. 4 Mei 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/309951-pandemi-covid-19-bisa-picu-baby-boom>. Diakses pada 24 November 2020.

^{xv} Media Indonesia. COVID-19 Turunkan angka partisipasi KB, Ancam Bonus Demografi. 3 Mei 2020.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/309889-covid-19-turunkan-angka-partisipasi-kb-ancam-bonus-demografi>. Diakses pada 24 November 2020

^{xvi} Kompasiana. Virus Corona dan Fokus Bonus Demografi 2030-2040. 27 Maret 2020.

<https://www.kompasiana.com/ervinyanuar1472/5e7df37b097f367e8d49b502/virus-corona-dan-fokus-bonus-demografi-2030-2040>. Diakses pada 29 November 2020